

RANCANGAN

CATATAN RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

----- (BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/tanggal	: Selasa, 6 Februari 2018.
Waktu	: Pukul 10.30 – 13.30 Wib
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dibuka pukul 10.30 WIB, dengan agenda rapat membahas mengenai :

- Evaluasi terhadap kinerja pencegahan dan pemberantasan narkotika oleh BNN selama tahun 2017
- Upaya Kepala BNN mengurangi over kapasitas di lapas/rutan akibat banyaknya narapidana narkotika di daerah
- Pelaksanaan koordinasi dan upaya nyata BNN bekerja sama dengan Dir. Narkoba, Imigrasi Pemda dan instansi terkait dalam mencegah peredaran narkotika selama tahun 2017
- Road Map atau arah kebijakan BNN di Tahun 2018

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Beberapa hal yang disampaikan Komisi III DPR RI kepada Kepala BNN, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Sesuai dengan Tugas dan Wewenang Badan Narkotika Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, meminta penjelasan Kepala BNN terkait evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan BNN beserta kinerja pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika oleh BNN sampai bulan Januari 2018.
- Meminta penjelasan rinci Kepala BNN terkait upaya mengurangi over kapasitas Lapas/Rutan seluruh Indonesia akibat semakin banyaknya narapidana narkotika, termasuk upaya nyata dan bentuk koordinasi BNN dengan Direktorat Narkoba Polda setempat, pihak Imigrasi, Pemerintah

- Daerah dan stakeholder terkait di daerah.
- Meminta penjelasan rinci Kepala BNN terkait peta sebaran jaringan narkotika di Indonesia utamanya di berbagai tempat hiburan malam, kawasan pariwisata dan daerah-daerah yang terindikasi darurat narkoba, berikut upaya nyata BNN dalam memberantas peredaran narkotika di daerah yang terindikasi darurat narkoba tersebut.
 - Meminta penjelasan Kepala BNN terkait dengan arah kebijakan, target, dan program prioritas BNN di tahun 2018, berikut *Road Map* Program Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika di tahun 2018 sekaligus menurunkan angka prevalensi pengguna narkotika di Indonesia.
 - Penyerahan Modul Pendidikan Anti Narkoba oleh Ka BNN kepada Ketua Komisi III DPR RI berupa buku pencegahan peredaran narkoba dan jenis jenis narkotika
 - Bahwa BNN sengaja di mandulkan, anggarannya kecil bila dibandingkan dengan Polri, tetapi kinerjanya memuaskan. Bahwa di penjara sekalipun dijadikan ladang peredaran narkoba sehingga sangat sulit memberantas narkoba. Bahwa pengendalian narkoba susah karena pembuatannya dari berbagai campuran bahan sehingga sulit di deteksi. Bahwa perkembangan narkoba sangat pesat sehingga diperlukan update payung hukumnya.
 - Diharapkan BNN terus meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dalam memberantas narkoba seperti di Aceh.
 - Diharapkan agar politik anggaran terhadap BNN bisa dirubah dan ditingkatkan.
 - Meminta agar gembong narkoba di tembak mati, harus ada akses khusus untuk BNN di Lapas, karena banyak peredaran narkoba di lapas, meminta ada 1 orang petugas BNN berada di lapas.
 - Meminta masa jabatan Ka BNN di perpanjang, walaupun tidak bisa maka berharap penggantinya sama dengan Ka BNN yang lama, harus berani dan tahu hukum. Diharapkan Presiden lebih memperhatikan BNN dan mencari calon pengganti Ka BNN yang berkualitas. Berharap agar Ka BNN diperpanjang masa jabatannya, dan presiden bisa mengeluarkan Perpu terkait hal ini.
 - Meminta kepada Komisi III DPR RI semua program-program BNN didukung penuh.
 - Bahwa diperlukan juga pendekatan kebudayaan dalam pencegahan narkoba, bahwa ada bandar yang lebih banyak dari pemakai, mengapa hal ini bisa terjadi, apakah pemakai berubah menjadi bandar ketika berada di lapas
 - Bahwa pemberantasan di hulu sangat baik namun BNN gagal memberantas narkoba yang berada di lapas, berharap kedepannya BNN lebih fokus pemberantasan peredaran narkoba dalam penjara.
 - Diharapkan agar ada roadmap yang jelas antara BNN dan Lapas sehingga perlu ada keterbukaan untuk melihat kelemahan masing masing.
 - Diharapkan agar program penyuluhan-penyuluhan dari BNN diperkuat. Meminta penjelasan apakah pencegahan akan tetap menjadi prioritas kerja BNN.
 - Bahwa 50% peredaran narkoba berada di lapas bahkan ada Kalapas yang menjadi bandar narkoba. Bagaimana perkembangan *mindset* petani Aceh yang semula menanam ganja kemudian di didik untuk menanam tanaman produktif dan apakah BNN punya data para petani tersebut.

- Bahwa BNN dianggap belum berhasil karena belum ada keterbukaan dengan berbagai institusi terkait.
 - Diharapkan agar saat ada penyerahan mobil sosialisasi narkoba dari BNN kepada masyarakat bisa melibatkan anggota Komisi III DPR RI. Bahwa di Aceh sedang dilaksanakan Pusat Belajar Pertanian Terpadu untuk merubah mindset dari bertanam ganja menjadi bertanam tanaman produktif, berharap agar hal ini di bantu BNN dan CSR dari BUMN.
 - Terkait dengan maraknya peredaran narkoba di lapas, bahwa peredaran narkoba di Indonesia tidak lagi hanya bisnis semata, tetapi sudah merupakan proxy war untuk menghancurkan bangsa. Bahwa *supply* dan *demand reduction* harus terus digalakan, berharap ada roadmap yang menjadi prioritas khusus BNN.
 - Bahwa di Provinsi Sulawesi Selatan sudah darurat narkoba dimana pintu masuk narkoba ada di Pare-Pare, sarana prasarana pendukung untuk mendeteksi narkoba di pelabuhan banyak yang tidak memadai dan ditengarai ada permainan oknum di pelabuhan.
 - Diharapkan agar sosialisasi bahaya narkoba digalakkan, meminta agar anggota Komisi III DPR RI dilibatkan dalam sosialisasi tentang bahaya narkoba.
 - Bahwa program perubahan lahan ganja menjadi lahan produktif butuh biaya yang sangat besar, perlu kerjasama dengan berbagai pihak seperti Komisi III, pihak swasta dan pemerintah, dan meminta agar anggota Komisi III diberikan modul pendidikan anti narkoba dan contact person di BNN.
 - Bahwa kinerja BNN belum maksimal karena masih tumpang tindih dengan Dir narkoba Polri, berharap agar Dir narkoba di lebur ke BNN beserta dengan anggarannya. Meminta hal ini diusulkan kepada presiden, Bahwa tidak harus polisi yang menjadi Ka BNN, yang diperlukan adalah orang-orang yang memahami anatomi BNN.
 - Bahwa di Thailand pemerintah dan Kerajaan turun untuk merubah ladang opium menjadi ladang pertanian, hal ini dapat kita contoh dengan melibatkan pemerintah, swasta, dan semua elemen dalam merealisasikan *alternative development* di Aceh.
 - Meminta modul dan produk edukasi dari BNN disampaikan kepada semua anggota Komisi III DPR RI sehingga dapat membawa ke Dapil masing-masing.
 - Meminta agar Ka BNN menyampaikan daftar nama kalapas yang terindikasi narkoba.
 - Meminta agar peredaran narkoba di DPR RI di telaah siapa saja pelakunya dan kemana saja peredarannya agar DPR RI menjadi pilot project institusi yang bebas narkoba.
2. Beberapa hal yang disampaikan oleh Kepala BNN, diantaranya adalah sebagai berikut :
- Bahwa dalam mengatasi permasalahan Narkoba, diperlukan strategi khusus, yaitu keseimbangan penanganan antara *supply reduction* dan *demand reduction*. *Supply reduction* bertujuan memutus mata rantai pemasok Narkoba mulai dari produsen sampai pada jaringan pengedarnya, sedangkan *demand reduction* adalah memutus mata rantai para pengguna Narkoba.

- BNN tahun 2017 telah menyusun Modul Pendidikan Anti Narkoba untuk 5 (lima) sasaran, yaitu pelajar, mahasiswa, pekerja, keluarga, dan masyarakat. Modul Pendidikan Anti Narkoba ini merupakan program prioritas nasional yang sejalan dengan kebijakan nasional tentang revolusi mental. Modul tersebut telah diluncurkan di 4 wilayah, yaitu, Maluku Utara, Bali, Surabaya, dan Kalimantan Timur.
- BNN telah mendistribusikan mobil sosialisasi Narkoba yang dilengkapi dengan media sosial *center* yang dikelola oleh BNN Kabupaten/Kota di 22 provinsi, dengan harapan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat di wilayah Indonesia
- Kegiatan Advokasi, Sosialisasi, dan Kampanye STOP Narkoba pada tahun 2017 adalah sebanyak 10.939 kegiatan dengan melibatkan 2.525.131 orang
- BNN bekerja sama dengan pemerintah provinsi Aceh meluncurkan program unggulan, yaitu *Alternative Development (AD)* untuk mengganti tanaman narkotika dan mengubah profesi penanam ganja menjadi petani dalam produksi unggulan. Program ini diklaim telah berhasil di berbagai negara penghasil tanaman narkotika. Melalui AD, BNN, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan komponen bangsa diajak melakukan sinergi dalam pengembangan sosial budaya, menegakkan keamanan dan ketertiban, menjaga kelestarian lingkungan hidup dan hutan, serta meningkatkan ketahanan pangan dan menggagas terbangunnya agrowisata di provinsi Aceh.
- Jumlah Program Pemberdayaan yang ditranformasi ke masyarakat sebanyak 702 program
- Pelatihan penggiat anti Narkoba sebanyak 136 kegiatan dengan peserta sebanyak 28.080 orang, 719 kegiatan penyuluhan yang melibatkan 219.956 orang, dan pengembangan kapasitas sebanyak 150 kegiatan dengan peserta sebanyak 3.616 orang.
- Pemberdayaan Alternatif melalui pembinaan kawasan rawan sebanyak 110 program di 110 titik lokasi yang diikuti 1.160 masyarakat, mengubah kondisi masyarakat rawan narkoba menjadi masyarakat yang produktif tanpa mengedarkan narkoba
- Sebagai upaya deteksi dini penyalahgunaan Narkoba, pada tahun ini BNN memfasilitasi kegiatan tes urine yang diikuti oleh 158.193 orang, dengan hasil sebanyak 172 orang terindikasi positif mengkonsumsi Narkoba.
- Rehabilitasi Narkoba merupakan salah satu upaya untuk menyelamatkan para pengguna dari belenggu Narkoba.
- BNN telah meningkatkan 946 Fasilitas Rehabilitasi, 755 Fasilitas diantaranya Sudah Operasional.
- BNN telah merehabilitasi 18.311 penyalahguna Narkoba, baik di balai rehabilitasi maupun di dalam lembaga pemasyarakatan, dan telah memberikan layanan pasca rehabilitasi kepada 7.829 mantan penyalahguna Narkoba.
- Selain memberikan layanan rehabilitasi bagi penyalahguna Narkoba, BNN juga tengah melakukan pengembangan terhadap Balai Besar Rehabilitasi di Lido, Bogor, sebagai pusat pengkajian, pusat layanan, dan pusat pelatihan (*center of excellent*) dalam bidang rehabilitasi penyalahguna Narkoba. Sebagai langkah awal, BNN melalui Deputi Bidang Rehabilitasi

telah membuat *road map* pengembangan, analisa kekuatan, kelemahan, peluang serta tantangan yang akan dihadapi Balai sebagai Pusat Rehabilitasi Narkotika secara nasional.

- Beberapa upaya konkret yang dilakukan BNN selama ini yaitu :
 - Optimalisasi pelaksanaan asesmen terpadu bagi Pecandu, Penyalah Guna, dan Korban Penyalahgunaan nakorba oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) di seluruh satuan kerja BNN.
 - Mengoptimalkan pelaksanaan Rehabilitasi baik melalui rawat jalan maupun melalui rawat inap.
 - Melakukan penguatan kepada lembaga rehabilitasi baik instansi pemerintah maupun lembaga rehabilitasi komponen masyarakat.

➤ **REALISASI ANGGARAN BNN PER JENIS BELANJA TA. 2017**

JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	%
51 BELANJA PEGAWAI	433,657,322,000	425,447,386,593	98.1%
52 BELANJA BARANG	884,621,813,000	765,743,345,526	86.6%
53 BELANJA MODAL	624,438,655,000	569,138,787,699	91.1%
TOTAL BELANJA	1,942,717,790,000	1,760,329,519,818	90.6%

- Arah Kebijakan BNN 2018
 - Penanganan permasalahan narkoba secara seimbang antara *demand reduction* dan *supply reduction*.
 - Mengembangkan berbagai upaya dalam penanganan permasalahan narkoba secara holistik, integral, dan berkelanjutan.
 - Mengedepankan profesionalisme, dedikasi, dan tanggung jawab dalam penanganan permasalahan narkoba.
- Strategi BNN
 - Mengekstensifikasi dan intensifikasi informasi P4GN kepada seluruh lapisan masyarakat.
 - Menumbuhkembangkan kepedulian dan kemandirian masyarakat dalam rangka pelaksanaan P4GN.

- Mengembangkan akses layanan rehabilitasi penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba yang terintegrasi dan berkelanjutan.
- Mengungkap jaringan sindikat narkoba dan menyita seluruh aset terkait kejahatan narkoba.
- Menjalin kemitraan yang harmonis dan sinergis dengan berbagai komponen baik dalam maupun luar negeri dalam rangka optimalisasi pelaksanaan P4GN.
- Melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi good governance dan clean government di BNN.
- Kebijakan Operasional BNN
 - Pengembangan Sistem Informasi Manajemen P4GN
 - Pengembangan Laboratorium Uji Narkoba di Daerah
 - Pengembangan Laboratorium Uji Narkoba Pusat
 - Pelaksanaan Screening (Tes Urin) di Instansi Pemerintah
 - Peningkatan Kapasitas Balai Rehabilitasi BNN sebagai Pusat Layanan Unggulan (Center of Excellence) yang menjadi role model rehabilitasi narkoba yang terintegrasi dan berkelanjutan.
 - Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkoba
 - Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika
- Revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 - Revisi UU Narkotika Masuk Dalam RUU Prolegnas Prioritas Pada Tahun 2018
 - BNN dengan Kementerian/Lembaga terkait telah menyusun Naskah Akademik, DIM, dan Draft RUU
 - Pada Tahun 2017 telah dilaksanakan 10 (sepuluh) kali pembahasan dengan Panitia Antar Kementerian
 - Pada Tahun 2018 akan dilaksanakan kembali pembahasan Revisi Undang-Undang dengan menyesuaikan dengan Perubahan RUU KUHP
- Urgensi Revisi Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut:
 - Penyempurnaan pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika berjalan secara optimal
 - Penegakan hukum yang terkoordinasi dengan melibatkan instansi terkait pada bidang pemberantasan.
 - Penguatan pada bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat yang mempunyai tugas preventif sehingga dapat melindungi masyarakat secara optimal.
 - Memberikan kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang diharapkan dapat lebih efektif dalam menekan laju peredaran gelap narkotika
- Materi pembahasan dalam revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika (1)
 - Pengaturan Zat Psikoaktif Baru
 - Penyempurnaan Rumusan Ketentuan Pidana

- Penguatan Aparat Penegak Hukum Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika
 - Pengaturan Tim Asesmen Terpadu
 - Pemanfaatan harta kekayaan/harta benda hasil tindak pidana narkotika
- Bahwa terkait dengan Indonesia sekarang tidak hanya terima barang tetapi juga memproduksi narkoba sebab *demand* nya tinggi, *supply* bahan baku juga banyak. Bahwa keberhasilan mengungkap dalam jumlah besar juga berdasarkan informasi dari Cina. Bahwa BNN berhasil mengungkap penyelundupan 620 bahan narkotika dari Timor leste yang akan masuk ke Indonesia.
 - Bahwa terdapat modus terbaru pengiriman narkoba dikirim melalui paket dalam bentuk majalah dimana di setiap lembar majalah adalah bahan ekstasi.
 - Bahwa berdasarkan peristiwa yang ada, hampir sekitar 90% peredaran narkoba di kendalikan dari lembaga pemasyarakatan.
 - Bahwa perlu adanya keterbukaan dengan berbagai pihak terkait untuk mengatasi peredaran narkoba di lapas.
 - Bahwa kebutuhan BNN sebanyak 74 ribu personil, namun saat ini baru ada 5.700 personil.
 - Bahwa usaha untuk pengadaan sarana dan Prasarana BNN yang masih jauh tertinggal jika dibanding dengan ancaman yang dihadapi melawan para bandar narkoba.
 - Bahwa masih terdapat pengawasan yang kurang ketat terhadap adanya penerbangan dari China ke Manado tanpa di lengkapi X-ray. Berkaitan dengan hal tersebut perlu banyak pembaharuan dalam hal peralatan pendeteksi narkoba.
 - Bahwa Indonesia saat ini telah memiliki laboratorium yang terkait dengan narkoba dan jenis narkoba baru.
 - Bahwa import precursor bahan narkoba tidak diawasi dan tidak ada pertanggungjawaban untuk apa bahan tersebut di import
 - Bahwa adanya pengusaha besar di Indonesia yang menjadi bandar besar narkoba di Indonesia. BNN menunggu alat bukti yang kuat untuk menangkap yang bersangkutan.
 - Bahwa sasaran narkoba yang banyak saat ini termasuk ke anak TK dan SD sebagai regenerasi pangsa pasar. Terkait penanganan rehabilitasi dilakukan sebisanya karena adanya keterbatasan biaya.
 - Bahwa BNN sedang membuat Laboratorium Narkotika Nasional. Bahwa pembentukan K9 cukup mahal dan bisa mencapai Rp.150 juta serta biaya perawatannya mahal sehingga akan dilakukan breeding K9 di Lido.
 - Bahwa modul anti narkoba sulit untuk dimasukkan ke dalam pendidikan sekolah sehingga belum berlaku secara nasional.
 - Bahwa BNN telah membuat standar program rehabilitasi nasional agar hasil rehabilitasinya bisa maksimal.
 - Bahwa banyaknya narapidana yang masuk lapas sebelumnya bukan pecandu, namun ketika masuk lapas menjadi pecandu.
 - Bahwa pengganti Kepala BNN selanjutnya harus memiliki integritas dan telah berkirim surat ke Presiden agar ada regenerasi yang berkualitas di BNN dan berharap penggantinya berasal dari BNN.
 - Bahwa BNN sangat mendesak untuk memiliki kantor sendiri beserta keseluruhan fasilitas yang menunjang tugas dan wewenang BNN.

- Bahwa pendekatan secara adat dalam pencegahan narkoba sudah dilakukan, bahwa penggiat anti narkoba banyak dari tokoh adat
- Bahwa akan dikeluarkan inpres terkait alternatif development yang melibatkan berbagai pihak terkait untuk mengganti tanaman ganja dengan tanaman produktif
- BNN bekerjasama dengan Kepolisian dan TNI untuk memberantas oknum yang terlibat narkoba dan sekarang sudah tidak ditemukan lagi oknum yang terlibat dari TNI.
- Bahwa alat pemusnah narkoba yang besar hanya dimiliki oleh RSPAD. Bahwa yang ditemukan BNN tidak lebih dari 10% dari narkoba yang beredar di Indonesia
- BNN telah bekerjasama dengan Mendikbud dan Menteri Agama dalam rangka pembuatan modul anti narkoba dan kegiatan sosialisasi anti narkoba.
- BNN prioritaskan program pencegahan di tahun 2018, membangun kekuatan keluarga, tenaga pendidik, tokoh agama, hingga generasi penerus imun terhadap narkoba
- BNN menyerahkan Modul Pendidikan anti narkoba kepada Ketua Komisi III DPR RI.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi III DPR RI bersepakat dengan Kepala BNN untuk mengoptimalkan fungsi pencegahan dan sosialisasi terkait Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika bersama-sama dengan Anggota Komisi III DPR RI, guna meningkatkan peranserta, kesadaran, dan pemahaman masyarakat, terutama di daerah-daerah dalam rangka menurunkan angka prevalensi penyalahguna dan pecandu narkotika.
2. Komisi III DPR RI meminta Kepala BNN untuk melakukan optimalisasi pemberantasan dan pencegahan narkotika yang beredar dan dikendalikan dari Lembaga Pemasaryakatan dan meminta BNN untuk melakukan langkah koordinasi dan sinergitas dengan Kementerian Hukum dan HAM RI.
3. Komisi III DPR RI meminta Kepala BNN untuk melakukan sinergitas dan koordinasi nyata dengan Direktorat Narkoba Kepolisian, Kementerian Hukum dan HAM, Pemerintah Daerah, instansi terkait lainnya dan masyarakat dalam mencegah masuknya peredaran narkotika.
4. Komisi III DPR RI mendukung Road Map dan arah kebijakan BNN dalam melakukan pemberantasan dan pencegahan narkotika di tahun 2018.
5. Komisi III DPR RI mendukung penambahan anggaran BNN dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan manajemen kerja guna optimalisasi kinerja BNN dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika khususnya dalam pembangunan kantor-kantor BNN di Pusat dan daerah.

Rapat ditutup pukul 13.30 WIB

